**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya Era Reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sistem pemerintahan daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan daerah sendiri yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat di mengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP 71, Tahun 2010).

 Fenomena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang telah meraih tujuh kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang sangat baik sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah kota palembang sudah meningkatkan laporan keuangannya sendiri. Walaupun masih sedikit LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis, mengingat capaian LKPD belum mencapai target.

**Tabel 1.1**

**Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

**Kota di Sumatera Selatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | ENTITAS PEMERINTAH DAERAH | OPINI  |
|   | LKPD | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1 | 104 |  | Prov. Sumatera Selatan  | WDP | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | 118 |  | Kota Lubuklinggau | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 3 | 119 |   | Kota Pagar Alam | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4 | 120 |   | Kota Palembang | WTP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | 121 |   | Kota Prabumulih | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |  WTP |

Sumber : *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI, Tahun 2018*

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP No. 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi Aparatur pemerintah atau yang sering dikenal sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seperti yang dijelaskan oleh Indriasih (2014). SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelap digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal. Serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku dan sebagai tolak ukur tercapai atau tidaknya atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan SAP adalah manusia (Indriasih, 2014). Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008) Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik Kualitas SDM maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal–hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Dalam laporan keuangan pemerintah kota palembang dalam jangka waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2011-2017 mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada standar pelaporan, SDM, dan pengendalian intern yang berpengaruh terhadap hasil pelaporan keuangan pemerintah kota palembang. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okterina di Semarang provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa adanya hubungan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan kota semarang. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini adalah terletak pada tempat, waktu, dan objek penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang**”.

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota palembang ?
2. Bagaimana pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota palembang ?
3. Bagaimana sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemmerintah kota palembang ?

**1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah pada pokok permasalahan, maka masalah analisis perlu dibatasi. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang yang dimaksud adalah Standar Akuntansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah dan Sistem Pengedalian Intern di OPD Kota Palembang.
2. Unit observasi yang akan dianalisis yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang dengan responden Kepala dan Sekertaris/Kabid, masing-masing organisasi perangkat daerah.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas Aparatur Pemerintah (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Kota Palembang
3. Untuk menguji Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang.

**1.4.2 Manfaat**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah kota palembang mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan peningkatan kualitas LKPD
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya tentang peningkatan Kualitas LKPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi tugas akhir/skripsi secara singkat dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Bab tersebut menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

 Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang apa yang melatar belakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

 Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang terkait dan melandasi pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada penelitian ini. Mulai dari pengertian akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Palembang.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**

 Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional populasi dan sempel, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Bab ini menjelaskan hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Palembang.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

 Pada bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta rekomendasi penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil penelitian.